JRISS: Journal Review of Islamic and Social Studies
Vol. 2 No. 1 (2026), 11-24
e-ISSN: 3110-2611
Doi: 10.64845/riss.v1i1
Journal homepage: https://athallahpublishing.com/index.php/jriss/index

Research Paper

Telaah Filosofis terhadap Sumber Pengetahuan dan Teori Kebenaran dalam Menghadapi Hoaks dan Post-Truth

Andi Dian Wulandari[1], Andi Ulfa Wulandari[2]
[1,2],Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
*Corresponding author: andidianwulandari228@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Epistemologi
Sumber Pengetahuan
Teori Kebenaran
Hoaks
Post-Truth

Article history
Received: 12 September 2025
Revised: 25 October 2025
Accepted: 15 November 2025
Available online: 06 January 2025

ABSTRAK

Fenomena hoaks dan post-truth menunjukkan krisis epistemik di era digital, di mana batas antara fakta dan opini menjadi kabur. Kondisi ini menuntut telaah filosofis terhadap konsep sumber pengetahuan dan teori kebenaran sebagai dasar untuk memahami cara manusia memperoleh serta memverifikasi pengetahuan. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-filosofis dengan menganalisis pandangan rasionalisme dan empirisme sebagai dua arus utama dalam epistemologi klasik, serta menelaah tiga teori kebenaran: korespondensi, koherensi dan pragmatisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa hoaks dan post-truth muncul akibat tergerusnya prinsip rasionalitas dan objektivitas dalam proses penilaian kebenaran.Rasionalisme menegaskan pentingnya nalar logis, sementara empirisme menuntut verifikasi faktual sebagai dasar klaim pengetahuan. Ketiga teori kebenaran berfungsi sebagai instrumen kritis untuk membedakan antara pengetahuan yang sahih dan informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, penguatan kesadaran epistemologis masyarakat menjadi kunci dalam melawan hoaks dan post-truth melalui pemulihan nilai kebenaran, rasionalitas dan tanggung jawab intelektual.

Copyright©2026 Authors
This is an open access article underCC-BY 4.0license

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Informasi kini dapat diakses dengan cepat, tetapi kemudahan ini juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks dan disinformasi. Fenomena post-truth semakin memperumit persoalan, karena emosi dan pendapat pribadi sering kali lebih memengaruhi pandangan masyarakat dibandingkan fakta yang sebenarnya. (Wera, 2020). Kondisi ini menimbulkan krisis pengetahuan yang berdampak pada polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan publik, serta melemahnya praktik demokrasi yang sehat. (Waston, 2025). Selain itu, kemajuan teknologi informasi, terutama melalui kehadiran internet juga telah mengubah secara mendasar cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan pengetahuan. Era digital menghadirkan kemudahan luar biasa dalam memperoleh informasi secara cepat dan luas, namun bersamaan dengan itu muncul tantangan serius berupa maraknya penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks. Dampak dari hoaks tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga dapat mengganggu tatanan sosial, merusak kepercayaan antarwarga, dan memengaruhi arah kebijakan publik secara tidak proporsional. (Pratiwi, 2025). Dalam praktiknya, hoaks kerap disampaikan melalui narasi yang sarat emosi dan bias, sehingga fakta-fakta objektif sering kali tersingkir atau bahkan dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Di tengah kompleksitas ini, perlunya pemahaman yang mendalam mengenai kebenaran dan bagaimana sebuah informasi dinilai benar.

Secara filosofis, persoalan ini terkait erat dengan epistemologi, cabang filsafat yang membahas sumber, batas dan validitas pengetahuan. Sejak Plato membedakan antara *doxa* (opini) dan *episteme* (pengetahuan sejati), persoalan kebenaran telah menjadi inti diskursus filsafat. Rasionalisme, seperti yang dikemukakan Descartes, menekankan akal budi sebagai dasar kepastian pengetahuan, (Bakhtiar, 2017). Sedangkan empirisme, seperti yang diajukan john Locke dan David Hume, menekankan pengalaman inderawi sebagai sumber utama pengetahuan. (Rohana, 2021). Seiring berjalannya waktu, teori-teori tentang kebenaran muncul dalam berbagai bentuk, seperti korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda dalam memahami hakikat kebenaran. Teori korespondensi menekankan kesesuaian antara pernyataan dengan realitas objektif, sementara teori koherensi menyoroti konsistensi internal suatu informasi dalam jaringan pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, teori pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan konsekuensi praktis yang dihasilkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (Suhasti, 2020).

Sejumlah penelitian telah mencoba menjelaskan fenomena hoaks dan post-truth dari berbagai sudut pandang. M. Syaiful Padli dan M. Lutfi Mustofa (2021) menegaskan bahwa teori-teori kebenaran dalam filsafat, seperti korespondensi, koherensi, pragmatisme, performatif, konsensus, hingga agama dapat diaktualisasikan sebagai kerangka penyaringan berita di era digital. Sementara itu, Dinda Ocvita Windi Pratiwi (2025) mengkaji penerapan teori kebenaran: korespondensi, koherensi, dan pragmatism dalam strategi pemberantasan hoaks, dan menekankan pentingnya literasi digital yang berbasis prinsip-prinsip filosofis. Kajian lain oleh Marz Wera (2021) menyoroti bagaimana narasi post-truth beroperasi melalui emosi sosial dan populisme agama, memperkuat penerimaan informasi yang tidak diverifikasi secara rasional. Meski demikian, belum banyak penelitian di Indonesia yang secara eksplisit menyatukan teori sumber pengetahuan dan teori kebenaran sebagai kerangka filosofis untuk memahami dan menghadapi hoaks serta post-

truth. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menawarkan pendekatan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara filosofis konsep sumber pengetahuan dan teori kebenaran dalam menghadapi hoaks dan post-truth, serta mengidentifikasi bagaimana pemahaman epistemologis dapat memperkuat daya kritis masyarakat terhadap informasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus membuka ruang bagi strategi literasi kritis yang berbasis filsafat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana sumber pengetahuan dalam filsafat dapat digunakan untuk memahami dan menghadapi hoaks serta post-truth, bagaimana teori kebenaran dapat dijadikan kerangka analisis dalam membedakan informasi yang benar dan menyesatkan, serta apa relevansi telaah filosofis terhadap sumber pengetahuan dan teori kebenaran dalam memperkuat daya kritis masyarakat di era digital. Tujuan dari penelitian ini, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis sumber pengetahuan, menelaah teori-teori kebenaran dan relevansinya dalam menghadapi hoaks dan post-truth, serta memberikan kerangka filosofis yang dapat memperkuat daya kritis masyarakat dalam era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema sumber pengetahuan, teori kebenaran, serta fenomena hoaks dan *post-truth*. Sumber primer berupa teks-teks filsafat yang membahas epistemologi dan teori kebenaran, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian kontemporer yang mengulas persoalan kebenaran dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur di perpustakaan dan repositori daring, dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi sumber. Analisis dilakukan secara filosofis-kritis, yaitu dengan menguraikan atau menafsirkan sumber pengetahuan dan teori kebenaran, lalu menyusunnya dalam sintesis yang menghubungkan teori filsafat dengan fenomena hoaks dan post-truth. Melalui cara ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana teori-teori epistemologi dapat menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat daya kritis dalam menghadapi tantangan pengetahuan kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Sumber Pengetahuan dalam Tradisi Filsafat

Dalam kajian filsafat ilmu, sumber pengetahuan merupakan pokok yang sangat fundamental dengan menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat diperoleh oleh manusia. John Locke (1632-1704) dalam karyanya yang sangat masyhur *Essay Concerning Human Understanding* mengindikasikan bahwa masalah terkait sumber-sumber pengetahuan adalah termasuk masalah utama dan mendasar yang harus dituntaskan. Tak berbeda dari John Locke, Immanuel Kant (1724-1804) juga memposisikan isu tersebut sebagai posisi yang pertama di antara berbagai persoalan hidup lainnya yang pokok. (Nasution, 2016). Terdapat beberapa sumber pengetahuan yang menjadi topik pembahasan dalam kajian yang akan diurai sebagai berikut.

1. Rasionalisme

Paham rasionalisme merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pertimbangan akal. Bahkan akal dipahami dapat memperoleh dan memahami pengetahuan sekalipun belum didukung oleh fakta empiris. (Sumarna, 2008). Kaum rasionalis beranggapan bahwa ilmu lahir dari proses penalaran logis, bukan semata-mata dari pengalaman empiris seperti dalam faham empirisme. Tanpa kemampuan bernalar, manusia tidak mungkin mencapai pengetahuan. Rasio pada hakikatnya adalah kegiatan berpikir, dan melalui proses berpikir inilah pengetahuan terbentuk. Hanya manusia yang menggunakan daya pikirnya yang dapat memperoleh pengetahuan. Semakin giat manusia mengolah pikirannya, semakin luas pula pengetahuan yang dimilikinya. Atas dasar pengetahuan itulah manusia bertindak dan menentukan arah perbuatannya, sehingga perbedaan pengetahuan akan melahirkan perbedaan perilaku, tindakan, dan sikap hidup. Pemikiran ini banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Rene Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff, meskipun akar gagasannya sesungguhnya telah tampak dalam filsafat klasik, misalnya pada Plato, Aristoteles, dan para pemikir lainnya. Menurut paham rasionalisme, pengembangan kualitas manusia (sumber daya manusia) harus ditempuh melalui pendekatan disiplin mental. Artinya, manusia perlu dilatih untuk berpikir secara teratur, sistematis dan logis. (Suaedi, 2016).

Menurut pandangan penulis, rasionalisme memiliki daya tarik tersendiri karena menegaskan martabat manusia sebagai makhluk berpikir yang mampu menyingkap kebenaran melalui akalnya. Rasio bukan hanya sekadar alat logis untuk menimbang benar dan salah, melainkan juga cermin dari kebebasan batiniah manusia dalam mencari makna. Dengan berpikir, manusia tidak sekadar mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran akan dirinya dan dunianya. Di sinilah letak kemanusiaan yang paling hakiki: kemampuan untuk menata pengalaman hidup ke dalam kerangka yang runtut, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menganggap bahwa rasionalisme, bukanlah dijadikan sebagai penolakan terhadap pengalaman, melainkan penegasan bahwa pengalaman baru memperoleh nilai ketika diolah oleh akal. Dengan demikian, rasionalisme mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berhenti pada apa yang tampak, tetapi harus berani menembus lebih dalam melalui daya pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga transformatif bagi kehidupan.

2. Empirisme

Secara epistemologis, istilah empirisme berakar dari bahasa Yunani *empeiria* yang berarti pengalaman. Paham ini dikembangkan oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan terutama David Hume. Berbeda dengan rasionalisme yang menempatkan akal budi sebagai sumber utama pengetahuan, empirisme menegaskan bahwa pengalamanlah yang menjadi dasar pengenalan, baik pengalaman yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Menurut pandangan empirisme, pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman langsung, dan kebenaran pengetahuan bergantung pada fakta-fakta yang dapat diamati. Karena gejala alam bersifat konkret, maka pengetahuan hanya dapat ditangkap melalui pancaindra. Dalam hal ini, pengamatan menjadi sumber utama pengetahuan yang menghasilkan dua bentuk: kesan (impressions) dan ide (ideas). Kesan adalah pengalaman langsung yang jelas dan kuat, misalnya rasa panas ketika tangan menyentuh api. Sementara itu, ide merupakan representasi mental dari

kesan tersebut, yang muncul melalui ingatan atau refleksi. Contohnya, meskipun tidak lagi bersentuhan dengan api, seseorang tetap dapat membayangkan rasa panas yang pernah dialami. Dengan demikian, akal tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya mengolah data empiris yang diperoleh dari pengalaman indrawi. (Alvi Syahrin, dkk, 2020).

Bagi Thomas Hobbes, pengalaman indrawi merupakan titik awal dari segala bentuk pengetahuan. Pengetahuan intelektual, menurutnya, tidak lebih dari suatu bentuk perhitungan atau kalkulasi, yakni pengolahan serta penggabungan data-data indrawi dengan cara yang beragam. Dunia beserta materi di dalamnya dipandang sebagai objek pengetahuan yang tersusun dalam suatu sistem material, yang berlangsung terus-menerus berdasarkan hukum mekanistik. Dengan pandangan tersebut, pemikiran Thomas Hobbes dapat dipahami sebagai sistem materialisme pertama dalam sejarah filsafat modern. (Suaedi, 2016). Setelah melihat penjelasan terkait empirisme dapat dipahami bahwa empirisme menghadirkan pandangan yang sangat dekat dengan pengalaman manusia sehari-hari. Sejak lahir, manusia berhadapan dengan dunia melalui pancaindra, merasakan, melihat, mendengar, dan menyentuh realitas yang ada di sekitarnya. Dari pengalaman-pengalaman inilah pengetahuan mulai terbentuk, lalu diolah menjadi pemahaman yang lebih luas. Empirisme mengingatkan bahwa pengetahuan tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari interaksi manusia dengan lingkungannya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dengan menekankan pengalaman sebagai dasar pengetahuan, empirisme menegaskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, sebab pengalaman adalah sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia itu sendiri. Pandangan ini sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pengetahuan bersifat dinamis, selalu berkembang seiring bertambahnya pengalaman yang dialami manusia dalam perjalanan hidupnya.

3. Intuisi

Menurut Henri Bergson, intuisi merupakan bentuk tertinggi dari evolusi pemahaman manusia. Kemampuan ini memiliki kemiripan dengan insting, tetapi dibedakan oleh adanya kesadaran dan kebebasan dalam penggunaannya. Intuisi tidak muncul begitu saja, melainkan membutuhkan pengembangan melalui usaha. Henri Bergson menjelaskan bahwa intuisi adalah pengetahuan langsung yang bersifat mutlak, bukan sekadar pengetahuan simbolis yang bersifat analitis. Karena itu, intuisi dipandang sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan seketika, melampaui keterbatasan representasi simbolis. (Rohana, 2021). Intuisi dipahami sebagai salah satu cara manusia memperoleh pengetahuan tanpa melalui proses berpikir rasional yang terstruktur. Melalui intuisi, seseorang dapat secara tiba-tiba menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Eksistensi intuisi sebagai sumber ilmu diakui oleh tokoh seperti Maslow maupun Nietzsche. Maslow, misalnya, menyebut intuisi sebagai peak experience (pengalaman puncak), sedangkan Nietzsche menilai intuisi sebagai bentuk pengetahuan tertinggi. (Surisumantri, 1982). Menurut Nietzsche, intuisi memiliki sifat yang sangat personal sehingga tidak bisa dialihkan atau ditransformasikan kepada orang lain. Sementara itu, kebenaran ilmiah justru menuntut adanya generalisasi agar bisa diterapkan secara luas, yang jelas berbeda dengan kebenaran intuitif. Karena itu, intuisi tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Ia hanya bisa dijadikan titik awal berupa hipotesis yang masih perlu diuji melalui analisis lebih lanjut. (Sumarna, 2008).

Intuisi merupakan dimensi pengetahuan yang memperlihatkan sisi terdalam dari kemanusiaan. Ada kalanya akal dan pengalaman tidak cukup untuk menjelaskan secara tuntas apa yang kita pahami, dan pada titik inilah intuisi bekerja sebagai jalan batiniah yang memberi pencerahan seketika. Intuisi membuat manusia mampu menangkap makna yang lebih halus dari realitas, sesuatu yang tidak selalu dapat dijangkau oleh logika atau pengalaman indrawi. Bagi saya, intuisi adalah bukti bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional dan empiris, tetapi juga makhluk yang memiliki kepekaan batin untuk merasakan kebenaran secara langsung. Dengan intuisi, pengetahuan tidak hanya berhenti pada tataran rasional atau faktual, melainkan menyentuh kesadaran yang lebih mendalam, sehingga mampu membentuk sikap hidup yang lebih arif dan manusiawi.

4. Wahyu

Wahyu dipahami sebagai pengetahuan yang bersumber langsung dari Tuhan dan disampaikan kepada manusia melalui perantara, seperti malaikat kepada para nabi. Pengetahuan ini bersifat suci karena tidak lahir dari usaha akal atau pengalaman manusia, melainkan merupakan anugerah ilahi yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup. Wahyu menyingkap kebenaran yang melampaui jangkauan rasio dan pengalaman indrawi, sehingga kedudukannya lebih tinggi dibandingkan bentuk pengetahuan lain. Melalui wahyu, manusia diarahkan untuk memahami hakikat hidup, menjalani kehidupan dengan nilai moral, serta menata hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, wahyu tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual yang menuntun manusia menuju kehidupan yang bermakna dan selaras dengan kehendak ilahi. (Ismail Marzuki, dkk, 2021).

Teori Kebenaran

Menurut Rene Descartes, pengetahuan dapat dipahami sebagai keyakinan yang dipegang teguh tanpa menyisakan keraguan, karena didukung oleh alasan yang cukup kuat untuk menjamin kebenarannya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa suatu hal benar adanya. Kebenaran pada dasarnya merupakan relasi metafisis, yakni ketika sebuah proposisi atau klaim tertentu dinilai tepat dan akurat saat dibandingkan dengan kenyataan. Relasi ini secara umum dipahami sebagai bentuk korespondensi, kesepakatan, atau kesesuaian antara isi proposisi dengan aspek tertentu dari realitas. Seiring perjalanan waktu, cara manusia menelusuri kebenaran pun mengalami perkembangan. (Bonjour, 2010). Dari sini lahirlah beragam teori yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda dalam memahami kebenaran.

1. Teori Korespondensi

Teori korespondensi menegaskan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila terdapat kesesuaian antara isi pernyataan tersebut dengan realitas yang ada. Kebenaran, dalam kerangka ini, dipahami sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi melalui kenyataan. Aristoteles merumuskannya secara sederhana: kebenaran hadir ketika kita menyebut yang ada sebagai ada, dan yang tidak ada sebagai tidak ada. (Lubis, 2016). Sebagai contoh, sebuah proposisi yang berbunyi "mobil saya berada di tempat parkir" dinyatakan benar menurut teori korespondensi apabila isi dari proposisi tersebut selaras dengan kenyataan yang ada. Artinya, keyakinan atau pernyataan itu memperoleh kebenarannya ketika sesuai dengan realitas independen yang dimaksud, yakni keberadaan

suatu objek fisik yang disebut mobil saya, tersusun dari logam, plastik, karet, dan unsur material lainnya, yang secara nyata berada pada lokasi parkir sebagaimana dinyatakan, dan tidak di tempat lain. (ramadani, 2022). Teori korespondensi menggunakan logika induktif yang merupakan cara berpikir yang berangkat dari pengalaman-pengalaman khusus menuju pada kesimpulan yang lebih umum. (Muhammad Sabri, dkk, 2009). Kebenaran dapat dipahami sebagai keselarasan antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan objek yang menjadi sasaran pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang diyakini atau dipikirkan manusia dianggap benar apabila sejalan dengan kenyataan yang dapat dibuktikan. Dalam kerangka ini, pengalaman empiris menjadi landasan utama, sebab melalui pengalamanlah manusia berjumpa langsung dengan realitas. Teori ini juga menegaskan adanya relasi timbal balik antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, serta menempatkan bukti sebagai syarat penting agar suatu pernyataan dapat diakui kebenarannya.

2. Teori Koherensi

Dalam pandangan teori koherensi atau juga disebut sebagai teori konsisten adalah suatu proposisi dinilai dengan benar apabila memiliki keterkaitan yang selaras dengan gagasan-gagasan lain yang lebih dulu diakui kebenarannya. Artinya, kebenaran tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian realitas di luar diri manusia, melainkan oleh konsisten internal di dalam system pemikiran itu sendiri. Kaum rasionalis dan idealis menekankan bahwa manusia tidak selalu mampu menjangkau kebenaran objektif secara langsung, sebab yang kita miliki hanyalah kesan-kesan atau pendapat tentang sesuatu. Kesan itu bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain, sehingga tidak ada jaminan bahwa pandangan kita akan identik dengan pandangan orang lain. Oleh karena itu, teori ini menuntut adanya kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kebenaran, yakni konsistensi. Suatu pendapat dianggap benar apabila ia tetap menunjukkan ketetapan setelah diuji berulang kali, baik melalui eksperimen maupun melalui kesepakatan banyak orang yang menghasilkan pandangan serupa. Dengan demikian, kebenaran dalam teori konsistensi disebut sebagai kebenaran imanen yang berakar dalam batin manusia. Ia tidak langsung dijangkau dari objek di luar diri, melainkan merupakan pengenalan kembali terhadap sesuatu yang sesungguhnya telah ada dalam diri kita. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Plato tentang innate ideas, yaitu keyakinan bahwa ide-ide dasar telah melekat pada manusia sejak lahir dan pengetahuan pada hakikatnya adalah proses mengingat kembali apa yang sudah tertanam dalam jiwa. (Soelaiman, 2019).

Sebagai ilustrasi dalam ranah matematika, misalkan dalam sistem bilangan bulat kita sudah menerima aturan dasar bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Dari aturan ini, kita tahu bahwa 2, 4, 6, dan seterusnya adalah bilangan genap. Jika kemudian ada pernyataan baru, misalnya "jumlah dua bilangan genap selalu menghasilkan bilangan genap," maka kebenaran pernyataan ini tidak perlu diuji dengan menghitung semua kemungkinan. Ia dianggap benar karena konsisten dengan definisi dan aturan yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan mendasar antara teori koherensi dan teori korespondensi terletak pada pijakan dalam membuktikan kebenaran. Teori korespondensi menilai benar tidaknya suatu pernyataan berdasarkan kesesuaiannya dengan fakta yang dapat diamati, sedangkan teori koherensi menekankan pada konsistensi pernyataan tersebut dengan postulat atau prinsip yang telah diterima sebelumnya. (M. Syaiful Padli, M. Lutfi Mustofa, 2021). Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang menyatakan bahwa di

kolam alun-alun kota hidup seekor ikan hiu. Menurut teori korespondensi, untuk memastikan kebenaran pernyataan itu, kita perlu menunggu bukti nyata: apakah benar terdapat hiu di dalam kolam tersebut atau tidak. Namun, menurut teori koherensi, tanpa harus menunggu fakta empiris, kita dapat langsung menolak pernyataan itu karena bertentangan dengan pengetahuan yang sudah mapan, yakni bahwa hiu merupakan ikan laut yang hidup di air asin. Tidak masuk akal jika seekor hiu dapat bertahan hidup di kolam alun-alun yang berisi air tawar.

3. Teori Pragmatis

Teori ini pertama kali digagas oleh Charles S. Peirce (1839–1914) melalui sebuah makalah berjudul "How to Make Our Ideas Clear?" yang terbit pada tahun 1878. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sejumlah filsuf Amerika, sehingga aliran ini kerap disebut sebagai filsafat khas Amerika. Tokoh-tokoh penting yang turut memperkaya dan menyebarkan gagasan ini antara lain William James (1842–1940), John Dewey (1859–1952), serta George Herbert Mead (1863–1931). Menurut pandangan ini, kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh sejauh mana memberi manfaat bagi manusia dalam bertindak dan menjalani kehidupan. Dengan kata lain, sebuah pernyataan dianggap benar apabila memiliki fungsi nyata, memberikan kegunaan praktis, dan membantu manusia dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari. (Burhanuddin, 2018).

Teori pragmatis dapat diilustrasikan ketika seorang guru di sekolah dasar mengajarkan konsep pecahan kepada murid-muridnya dengan menggunakan potongan kue sebagai alat bantu. Ia membagi kue menjadi beberapa bagian dan menunjukkan bahwa satu potong dari empat bagian berarti satu per empat. Anak-anak pun lebih mudah memahami konsep tersebut karena mereka melihat langsung dan merasakan pengalaman konkret. Menurut teori pragmatis, pendekatan ini dianggap benar secara pedagogis karena terbukti efektif dalam membantu anak-anak memahami materi. Kebenaran tidak hanya diukur dari definisi formal dalam buku teks, tetapi dari sejauh mana metode tersebut berhasil memfasilitasi pemahaman dan memberi manfaat nyata dalam proses belajar. Dengan demikian, teori pragmatis menekankan bahwa kebenaran suatu gagasan atau metode terletak pada keberhasilannya dalam kehidupan manusia yaitu dalam hal ini, keberhasilan guru membangun pemahaman melalui pengalaman langsung yang bermakna bagi murid-muridnya.

Hoaks dan Post-Truth sebagai Tantangan Epistemologis

1. Hoaks

Istilah hoaks berasal dari bahasa Inggris *hoax* yang berarti tipuan, kebohongan, berita palsu, atau kabar bohong yang disebarkan oleh seseorang. Dengan demikian, hoaks dapat dipahami sebagai informasi yang tidak benar. Penting dicatat bahwa hoaks bukanlah singkatan, melainkan satu kata utuh dalam bahasa Inggris yang memiliki makna tersendiri. Menurut Wikipedia, hoaks didefinisikan sebagai pemberitaan palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau mengelabui pembaca maupun pendengarnya agar mempercayai sesuatu, meskipun pencipta informasi tersebut sadar bahwa isi berita itu tidak benar. Di era internet, ruang publik semakin terbuka sehingga masyarakat bebas menyampaikan pendapat atau opini, baik secara lisan, melalui media cetak, maupun media elektronik/online. Kondisi ini sekaligus memperluas peluang penyebaran hoaks. Sementara itu, Oxford English Dictionary mendefinisikan hoaks sebagai malicious deception, yakni

kebohongan yang diciptakan dengan tujuan jahat. Definisi ini menekankan bahwa hoaks tidak hanya sekadar informasi keliru, tetapi juga mengandung unsur kesengajaan untuk menyesatkan. (Jenner Simarmata, dkk, 2019). Dalam KBBI *hoaks* berarti informasi bohong. ((KBBI)).

Menurut Lynda Walsh dalam karyanya Sins Against Science, istilah hoax atau kabar bohong mulai dikenal dalam bahasa Inggris sejak era industri, dan diperkirakan pertama kali digunakan pada tahun 1808. Akar katanya diyakini berasal dari istilah hocus dalam mantra hocus pocus, sebuah frasa yang kerap diucapkan pesulap layaknya "sim salabim". Pada awal abad ke-19, kata hocus kemudian berubah menjadi hocs untuk merujuk pada berita yang tidak benar. Alexander Boese dalam bukunya *Museum of Hoaxes* mencatat bahwa salah satu hoaks pertama yang dipublikasikan adalah almanak palsu karya Isaac Bickerstaff dengan nama samaran Jonathan Swift, pada tahun 1709. Dalam almanak tersebut, Swift meramalkan kematian seorang astrolog bernama John Partridge, bahkan menambahkan obituari palsu pada tanggal yang disebut sebagai hari kematiannya. Tujuannya adalah mempermalukan Partridge di hadapan publik, dan akibatnya Partridge berhenti menerbitkan almanak astrologi selama enam tahun setelah peristiwa itu. (Sanjaya, 2023).

Istilah hoaks juga dalam ranah akademik mulai dipopulerkan oleh Curtis MacDougall pada tahun 1958. Dengan mendefinisikan hoaks sebagai ketidakbenaran yang sengaja diciptakan dan disamarkan agar tampak sebagai fakta atau kebenaran. Definisi ini menegaskan bahwa sejak awal, hoaks tidak pernah berlandaskan pada fakta, melainkan justru bertujuan agar sesuatu yang bukan fakta dapat diterima seolah-olah benar. Selanjutnya, John Hartley merumuskan sejumlah ciri yang dapat digunakan untuk mengenali hoaks. Pertama, hoaks kerap berbentuk pesan berantai dengan pola ancaman atau ajakan, misalnya "sebarkan kepada semua orang yang Anda kenal atau bencana akan datang." Kedua, hoaks umumnya tidak menyertakan data konkret mengenai peristiwa yang diklaim, ataupun informasi realistis yang dapat diverifikasi. Ketiga, informasi yang bersifat hoaks biasanya tidak memiliki batas waktu atau tanggal kedaluwarsa. Keempat, sumber rujukan yang dicantumkan jarang berasal dari lembaga kredibel, bahkan sering kali mengarah pada institusi yang tidak relevan dengan isi informasi. (Yani, 2020).

2. Post-Truth

Fenomena post-truth pertama kali mencuat ke perhatian publik pada tahun 2016, ketika Oxford Dictionaries menobatkannya sebagai Word of the Year setelah terjadi lonjakan penggunaan istilah ini hingga dua ribu persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam kamus tersebut, post-truth didefinisikan sebagai keadaan di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Dengan demikian, awalan "post" tidak dimaksudkan sebagai penanda waktu seolah-olah kita hidup setelah kebenaran, melainkan sebagai penanda bahwa kebenaran dianggap kurang penting dalam ruang publik. Akar dari fenomena ini dapat ditelusuri lebih jauh. Pada awal 1990-an, Steve Tesich menggunakan istilah post-truth untuk menggambarkan situasi politik Amerika yang sarat manipulasi. Kemudian, pada 2005, Stephen Colbert memperkenalkan istilah truthiness, yakni keyakinan pada sesuatu yang terasa benar meskipun tidak didukung bukti. Istilah ini awalnya terdengar jenaka, tetapi lambat laun disadari sebagai gambaran serius tentang bagaimana opini publik dapat dibentuk oleh intuisi dan emosi, bukan oleh data dan fakta. (Mclntyre, 2018).

Perkembangan kontemporer post-truth tampak jelas dalam peristiwa politik besar, seperti kampanye Brexit di Inggris dan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Dalam kedua peristiwa tersebut, retorika emosional, klaim tanpa bukti, dan bahkan istilah "fakta alternatif" digunakan untuk membentuk persepsi publik. Sejak saat itu, post-truth dipandang sebagai gejala global yang juga terlihat dalam politik populis di berbagai negara lain. (Mclntyre, 2018). Dengan demikian, post-truth bukan sekadar kebohongan biasa, melainkan sebuah fenomena sosial-politik yang menandai pergeseran budaya: dari penghargaan terhadap kebenaran menuju dominasi narasi yang dibangun atas dasar emosi, identitas, dan kepentingan tertentu. Fenomena inilah yang kemudian menjadi tantangan serius bagi filsafat pengetahuan, karena menuntut kita untuk kembali meninjau teori-teori kebenaran klasik dan menilai relevansinya dalam menghadapi krisis kebenaran di era digital.

3. Relevansi hoaks dan Post-Truth dengan Epistemologi

Fenomena hoaks dan post-truth telah menimbulkan kegelisahan epistemologis yang mendalam. Dalam filsafat pengetahuan, pengetahuan secara klasik dipahami sebagai *justified true belief*, yakni keyakinan yang benar dan memiliki dasar pembenaran yang sahih. Namun, dalam era digital yang ditandai oleh banjir informasi dan dominasi algoritma, hoaks dan post-truth menunjukkan bahwa keyakinan dapat terbentuk dan menyebar luas meskipun tidak benar dan tidak memiliki justifikasi yang memadai. Lee McIntyre menyebut post-truth sebagai "*a form of ideological supremacy whereby its practitioners are trying to compel someone to believe something whether there is good reason for it or not*". (Mclntyre, 2018). Pernyataan ini menegaskan bahwa post-truth bukan sekadar kebohongan, melainkan bentuk dominasi epistemik yang mengabaikan proses kebenaran. Sedangkan hoaks, sebagai bentuk informasi palsu yang sengaja disebarkan, sering kali dikemas dengan narasi yang koheren, otoritas semu, atau daya tarik emosional, sehingga tampak meyakinkan meskipun tidak sesuai dengan fakta. Dalam epistemologi, ini berarti klaim tersebut gagal memenuhi syarat korespondensi dan justifikasi. Sementara itu, post-truth memperlihatkan pergeseran budaya epistemik: fakta objektif tidak lagi menjadi landasan utama dalam membentuk opini publik, melainkan digantikan oleh emosi, identitas kelompok, dan keyakinan pribadi. Oxford Dictionaries mendefinisikan post-truth sebagai "*circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*". (Dictionaries). Definisi ini menandai krisis epistemik, di mana standar pembenaran terhadap klaim pengetahuan menjadi kabur dan relatif.

Lebih jauh, hoaks dan post-truth menantang teori-teori kebenaran yang telah lama menjadi fondasi epistemologi. Teori korespondensi, yang menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dan realitas eksternal, menjadi lemah ketika realitas itu sendiri dipinggirkan atau dipelintir. Teori koherensi, yang menekankan konsistensi internal dalam sistem keyakinan, dapat disalahgunakan untuk memperkuat bias dan membenarkan hoaks yang tampak logis. Bahkan teori pragmatisme, yang menilai kebenaran dari kegunaan praktis, dapat dipelintir menjadi pembenaran manipulatif jika "manfaat" yang dimaksud adalah efek politik atau pengaruh sosial, bukan kebenaran sejati. Michael P. Lynch menekankan bahwa kebenaran bukan sekadar cita-cita moral atau aturan normatif dalam berpikir, melainkan merupakan tujuan utama dari aktivitas intelektual manusia. Artinya, pencarian kebenaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menyangkut komitmen mendalam terhadap kejujuran intelektual dan tanggung jawab epistemik dalam kehidupan

berpikir kita. (Lynch, 2019). Dalam situasi ini, epistemologi berupa teori kebenaran tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tetapi sebagai alat kritis untuk menilai klaim pengetahuan di tengah banjir informasi.

Telaah Filosofis Terhadap Sumber Pengetahuan dan Teori Kebenaran dalam Menghadapi Hoaks dan Post-Truth

Dari yang telah dijelaskan di awal terkait beberapa sumber pengetahuan, dalam artikel ini memperdalam pada sumber pengetahuan rasionalisme dan empirisme karena memiliki kriteria ilmiah dibanding sumber pengetahuan intuisi dan wahyu. Ketika hoaks dan post-truth menyebar luas di ruang publik, maka pertanyaan mendasar yang muncul: "*darimana kita memperoleh informasi atau pengetahuan?" dan "bagaimana informasi itu dinilai benar?"*. Pada rasonalisme menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam konteks hoaks, pendekatan ini mengingatkan bahwa klaim yang emosional dan manipulatif harus diuji melalui penalaran logis. Sementara itu, empirisme menekankan pengalaman dan observasi sebagai dasar pembenaran. Hoaks sering kali gagal dalam uji empiris karena tidak didukung oleh bukti nyata. Dalam post-truth, fakta-fakta empiris justru sering diabaikan yakni fakta yang dapat diuji dan diverifikasi sering kali kehilangan daya pengaruhnya. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh kesesuaian dengan kenyataan, melainkan oleh seberapa kuat suatu narasi menyentuh emosi, memperkuat identitas kelompok, atau mengulangi keyakinan yang sudah ada. (Waston, 2025). Di tengah kondisi ini, masyarakat cenderung mempercayai informasi bukan karena informasi itu benar, tetapi karena terasa benar. Dalam konteks ini, filsafat pengetahuan memberi peringatan bahwa sumber informasi harus diuji, bukan hanya diikuti; dan bahwa kebenaran menuntut keberanian untuk berpikir kritis, bukan sekadar kenyamanan dalam keyakinan.

Fenomena post-truth menandai pergeseran cara manusia memahami kebenaran. Dalam situasi ini, emosi dan opini pribadi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Untuk memahami problem ini secara mendalam, diperlukan telaah filosofis terhadap teori-teori kebenaran, yaitu: korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. *Pertama*, teori korespondensi: menurut teori korespondensi (Aristoteles, Thomas Aquinas), suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks post-truth, teori ini menegaskan pentingnya verifikasi empiris sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Dalam menghadapi hoaks, teori ini menuntut adanya pembuktian fakta, misalnya dengan mengecek sumber berita, data, dan konteksnya. Tom Nichols menegaskan bahwa internet memiliki dualitas: selain berpotensi meningkatkan pengetahuan, ia juga dapat menurunkan kecerdasan. Internet bukan hanya menarik bagi mereka yang ingin belajar, tetapi juga menjerat individu yang kurang kritis. Platform daring membuat seseorang tampak sebagai ahli secara instan, padahal belum tentu memiliki pemahaman mendalam. Alih-alih menjadi ruang diskusi yang rasional dan terarah, internet sering kali dipenuhi oleh opini subjektif, rumor, ketidakpastian, informasi yang tidak valid, serta perdebatan yang tidak logis. Kondisi ini membuat orang lebih rentan terhadap bias informasi, cenderung hanya menyerap apa yang sejalan dengan keyakinannya, dan mengabaikan pandangan yang bertentangan. (Wera, 2020).

Kedua, teori koherensi: teori ini menilai kebenaran berdasarkan konsistensi dengan sistem pengetahuan lain yang telah diterima. Dalam konteks post-truth, teori ini mengingatkan bahwa klaim yang benar seharusnya tidak bertentangan dengan logika dan prinsip pengetahuan yang sudah mapan. Teori koherensi menawarkan sudut pandang

yang penting dalam memahami hoaks, terutama yang sengaja disusun agar selaras dengan ideologi atau keyakinan tertentu. Meski demikian, penerapan teori ini dalam membongkar hoaks menuntut pemahaman yang lebih luas mengenai konteks sosial dan budaya, serta partisipasi aktif komunitas untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pengetahuan yang lebih komprehensif. (Pratiwi, 2025). *Ketiga,* teori pragmatis (kebenaran sebagai fungsi praktis). William James dan John Dewey memandang bahwa sesuatu disebut benar jika bermanfaat dan dapat diuji dalam praktik kehidupan. (Nurdin K, Hasriadi , 2019). Dalam konteks hoaks dan post-truth, teori ini mendorong masyarakat untuk menilai kebenaran berdasarkan dampak dan nilai guna sosialnya, bukan sekadar pada daya tarik emosional atau politik. Hoaks yang memecah belah masyarakat tidak dapat disebut "benar", karena tidak membawa manfaat rasional maupun moral.

Dari telaah tersebut, sebagai contoh konkret yakni seorang perempuan berkerudung pink, yang kemudian diketahui bernama ibu Ana, menjadi sorotan publik setelah videonya saat aksi demonstrasi di depan DPR RI tersebar luas di media sosial. Dalam sebuah video, ibu Ana tampak berteriak lantang mengkritik pemerintah dan bahkan menyerukan pergantian presiden. Potongan rekaman tersebut cepat menyebar, memicu perdebatan publik. Hal yang menarik, muncul isu bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa teknologi (AI/deepfake). Namun, pihak keluarga kemudian mengklarifikasi bahwa ibu Ana memang benar-benar hadir di lokasi demo, meski keluarga yakni keponakan ibu Ana bernama Anas juga menyebut bahwa bibinya membutuhkan perhatian khusus. (Fery Noviandi, Shevinna Putri Anggraeni, 2025). Fakta ini memperlihatkan bagaimana sebuah potongan video bisa dengan cepat dimaknai berbeda-beda, bahkan dipelintir menjadi narasi politik tertentu. Terkait sumber pengetahuan, banyak orang mempercayai video tersebut tanpa memeriksa konteks lengkap atau sumber resmi. Ada yang langsung yakin itu asli, ada pula yang percaya itu rekayasa AI. Ini menunjukkan lemahnya verifikasi sumber pengetahuan di masyarakat.

Menilai secara korespondensi, klaim bahwa video itu hasil rekayasa AI tidak sesuai dengan fakta klarifikasi keluarga dan saksi di lapangan. Maka klaim tersebut gagal secara korespondensial. Secara koherensi, narasi yang menyebut ibu Ana sebagai "simbol perlawanan rakyat" tidak koheren dengan informasi lain yang menyatakan ibu tersebut membutuhkan perhatian khusus. Ada kontradiksi dalam sistem pengetahuan yang beredar. Kemudian secara pragmatis, dampak praktis dari viralnya video ini adalah polarisasi opini publik, sebagian mengagungkan, sebagian mencibir. Secara pragmatis, hoaks atau manipulasi narasi semacam ini lebih banyak menimbulkan kegaduhan ketimbang manfaat. Kasus "ibu berkerudung pink" memperlihatkan bagaimana post-truth bekerja di era digital, dimana sebuah potongan video singkat bisa dimaknai beragam, dipelintir, bahkan dituduh rekayasa teknologi. Dengan kerangka teori kebenaran, masyarakat bisa belajar menimbang klaim semacam ini secara lebih kritis, tidak hanya berdasarkan emosi atau viralitas.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman filosofis terhadap sumber pengetahuan dan teori kebenaran menjadi fondasi penting dalam menghadapi maraknya hoaks dan fenomena post-truth di era informasi. Dalam konteks epistemologi, empirisme dan rasionalisme memberikan dua kerangka utama dalam menjelaskan proses perolehan pengetahuan. Empirisme menekankan pengalaman dan observasi sebagai dasar

pengetahuan yang dapat diverifikasi, sedangkan rasionalisme menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam menilai validitas kebenaran. Sementara itu, teori kebenaran meliputi teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme yang memberikan ukuran objektif untuk menilai keabsahan klaim pengetahuan di tengah banjir informasi yang sering kali bersifat manipulatif. Melalui pendekatan filosofis ini, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif agar tidak mudah terjebak pada distorsi informasi, baik dalam bentuk hoaks maupun narasi post-truth. Dengan demikian, filsafat ilmu berperan strategis dalam meneguhkan kembali komitmen terhadap rasionalitas, objektivitas, dan integritas kebenaran di tengah krisis epistemik yang melanda dunia digital.

Referensi

Alvi Syahrin, dkk. (2020). *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum.* Jakarta: Kencana.

Bakhtiar, A. (2017). *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran Dan Kepercayaan Manusia.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Bonjour, L. (2010). *Epistemology: Classic Problems and Contemporary Respons.* Lanham: Rowman & Littlefield Publisher.

Burhanuddin, N. (2018). *Filsafat Ilmu.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Dictionaries, O. (t.thn.). Dipetik Oktober 5, 2025, dari Word of the Year 2016: Post-Truth.

Fery Noviandi, Shevinna Putri Anggraeni. (2025, September 6). *Suara.com*. Dipetik Oktober 5, 2025, dari https://www.suara.com/news/2025/09/06/134339/terungkap-video-ibu-jilbab-pink-yang-viral-bukan-ai-keluarga-jangan-terprovokasi

Ismail Marzuki, dkk. (2021). *Filsafat Ilmu Era Milenial.* Makassar: Fakuktas Teknik Universitas Fajar.

Jenner Simarmata, dkk. (2019). *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing.* t.t: Yayasan Kita Menulis.

(KBBI). (t.thn.). Dipetik Desember 5, 2025

Lubis, A. Y. (2016). *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer* . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Lynch, M. (2019). *Know it All Society: Truth and Arrogance in Political Culture.* t.t.: Norton & Company.

M. Syaiful Padli, M. Lutfi Mustofa. (2021). Kebenaran dalam Perspektif Filsafat serta Aktualisasinya dalam Menyaring Berita. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 84.

Mclntyre, L. (2018). *Post-Truth.* Cambridge: The MIT Press.

Muhammad Sabri, dkk. (2009). *Filsafat Ilmu.* Makassar: Alauddin Press.

Nasution, A. T. (2016). *Filsafat Ilmu: Hakikat Mencari Pengetahuan.* Yogyakarta: Deepublish.

Nurdin K, Hasriadi . (2019). *Filsafat Ilmu.* Palopoi: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo

Pratiwi, D. O. (2025). Penerapan Teori Kebenaran Filsafat Dalam Strategi Pemberantasan Hoaks di era Digital. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, 33.

Ramadani, D. (2022). *Filsafat Ilmu: Panduan Untuk Pemula.* Tangerang Selatan: Perkumpulan Fata Institute-Fins .

Rohana. (2021). *Filsafat Ilmu dan Kajiannya.* Makassar: UPT Mata Kuliah Umum UNM.

Sanjaya, G. M. (2023). *Hiax.* Surabaya: t. p.

Soelaiman, D. A. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam* . Banda Aceh:

Bandar Publishing.
Suaedi. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu.* Bogor: IPB Taman Kencana.
Suhasti, S. E. (2020). *Pengantar Filsafat Ilmu.* Yogyakarta: Prajnya Media.
Sumarna, C. (2008). *Filsafat Ilmu.* Bandung: Mulia Press.
Surisumantri, J. S. (1982). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Sinar Harapan.
Waston. (2025). *Filsafat Post-Truth: Krisis Kebenaran Dan Tantangan Rasionalitas Di Era Digital.* Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Wera, M. (2020). Merertas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, Dan Populisme Agama. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 13.
Yani, C. (2020). Pencegahan Hoaks di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial . *Jurnal Lemhannas*, 17.